



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI II DPR REPUBLIK INDONESIA
DENGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK
INDONESIA, DAN KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA
PEMILU REPUBLIK INDONESIA**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : I
Rapat ke- :
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari & Tanggal Rapat : Selasa, 12 September 2023
Waktu Rapat : Pukul 11.28 s.d. 13.27 WIB
Tempat Rapat : Ruang Rapat Komisi II (KK.III) Gedung Nusantara I, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
- Ketua Rapat : Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.
(Ketua/F-P.GOLKAR)
- Acara Rapat : Penyesuaian RKA-K/L Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan Penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2024.
- Sekretaris Rapat : Dahliya Bahnan, S.H., M.H.
(Kabag Set. Komisi II DPR RI)
- Hadir : 26 dari 47 orang Anggota dengan rincian
A. ANGGOTA DPR RI:
PIMPINAN:
1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.
(Ketua/F-P.GOLKAR)
2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.
(Wakil Ketua/F-PDIP)
3. Saan Mustopa, M.Si.
(Wakil Ketua/F-NASDEM)
4. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.
(Wakil Ketua/F-PPP)

ANGGOTA:

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDOENSIA PERJUANGAN:
6 orang Anggota dari 12 Anggota:
 1. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
 2. Riyanta
 3. Drs. Cornelis, M.H.
 4. Paryono
 5. Hj. Aida Muslimah
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:
5 orang Anggota dari 7 Anggota:
 1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
 2. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, M.B.A.
 3. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H., M.Kn.
 4. Drs. H. Riswan Tony DK
3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:
2 orang Anggota dari 6 Anggota:
 1. Andika Pandu Purgabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.
4. FRAKSI PARTAI NASDEM:
2 orang Anggota dari 4 Anggota:
 1. Aminurokhman, S.E., M.M.
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:
3 orang Anggota dari 4 Anggota:
 1. Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.
 2. H. Haruna, M.A., M.B.A
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:
4 orang Anggota dari 5 Anggota:
 1. H. Mohammad Muraz, M.M.
 2. Rezka Oktoberia
 3. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.
7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTARA:
4 orang Anggota dari 4 Anggota:
 1. Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng.
 2. Drs. H. Chairul Anwar, Apt.
 3. Teddy Setiadi, S.I.Kom.
 4. KH. Aus Hidayat Nur
8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:
2 orang Anggota dari 4 Anggota:
 1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
 2. Ir. Ibnu Mahmud Bilalludin

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:
1 orang Anggota dari 1 Anggota:

B. ANGGOTA YANG IZIN/SAKIT:

1. H. Heru Sudjatmoko (Izin)
2. Ir. Hugua (Izin)
3. Drs. Difriadi (Izin)
4. Khairul Muhtar, S.E., M.M. (Izin)

C. UNDANGAN:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP);
3. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Kita mulai ya?

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang,

Salam sejahtera buat kita semua,

**Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajaran,
Yang terhormat Saudara Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan
beserta seluruh jajaran,
Yang terhormat Saudara Ketua DKPP dan Anggota DKPP beserta seluruh
jajaran,
Yang terhormat seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,**

Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini masih dapat melaksanakan tugas-tugas kita terutama tugas konstitusional di bidang anggaran dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Sesuai dengan laporan sekretariat, rapat hari ini telah memenuhi seluruh perwakilan 9 fraksi yang ada, oleh karena itu saya menyatakan bahwa forum rapat

ini sudah mulai kuorum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI, dan perkenankanlah saya untuk membuka rapat ini dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.28 WIB)

Untuk pertama kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Dalam Negeri, Kepala BNPP, dan Ketua DKPP atas kesediaannya memenuhi undangan kami pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Bapak/Ibu sekalian,

Sebagaimana tiap tahunnya saat-saat ini kita masih memasuki pembahasan atau berada di jadwal atau siklus anggaran, yang dikeluarkan oleh Badan Anggaran DPR RI. Dan kita ditugaskan kepada seluruh komisi untuk melakukan rapat-rapat dengan mitra kerja dalam rangka penyusunan RKAKL. Dan kita sudah melaksanakan rapat ini sebanyak 2 kali ya.

Beberapa bulan yang lalu kita melaksanakan rapat kerja seperti ini, di ruang ini dan kemudian dilanjutkan dengan rapat pendalaman, bersama dengan masing-masing sekretaris atau sekretaris jendral setiap Kementerian dan Lembaga.

Nah, oleh karena itu saya ingin menawarkan bahwa rapat kita pada hari ini adalah membahas tentang soal penyesuaian RKAKL RAPBN Tahun 2024, sesuai dengan pembahasan yang dilaksanakan oleh Badan Anggaran dan kemudian kita mengambil keputusan sekaligus penetapan RAPBN Tahun 2024.

Apakah kita bisa setuju Bapak/Ibu sekalian?

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian, saya ingin menawarkan bahwa rapat ini harus kita sepakati sampai jam berapa, saya menawarkan 12.30 ya? Nanti kalau seperti biasanya, kalau sudah, kalau masih ada pembahasan lebih lanjut bisa kita perpanjang.

Setuju ya Bapak/Ibu sekalian ya?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/Ibu sekalian,

Supaya rapat kita ini efektif ya, nanti mungkin penjelasan dari masing-masing mitra kita juga tidak perlu terlalu panjang, saya ingin menyampaikan kesimpulan rapat kita dalam pendalaman yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu ya. Bisa ditampilkan enggak ini ya? Biar langsung kalau setuju, setuju begitu.

Yang pertama adalah pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 sebesar Rp3.320.804.560.000,00 itu sudah termasuk didalamnya pagu anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebesar Rp67.381.500.000,00. Namun untuk pengalokasian anggaran kegiatan pada masing-masing program, Komisi II DPR RI meminta Kemendagri dan DKPM melakukan penyesuaian dengan memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh Komisi II DPR RI, yang kemudian akan dibahas kembali dan diberitahukan pada rapat selanjutnya.

Jadi angkanya ini yang penting ini Pak Sekjen ini karena kalau kurang nol (0)-nya bisa repot ini.

Yang kedua, Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran BNPP Tahun 2024 sebesar Rp231.300.651.000,00. Namun untuk pengalokasian anggaran kegiatan pada masing-masing program, Komisi II DPR RI meminta BNPP melakukan penyesuaian dengan memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh Komisi II DPR RI.

Kemudian yang ketiga, Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024, yang diajukan oleh DKPP sebesar Rp22.621.720.000,00.

Dan kemudian kami juga baru mendapatkan informasi dari Badan Anggaran kemarin, yang pada intinya mengakomodir penambahan anggaran untuk kenaikan gaji sebagai berikut:

1. Untuk Kemendagri termasuk DKPP sebesar Rp26.967.272.000,00;
2. Dan untuk BNPP sebesar Rp1.273.658.000,00.

Dengan adanya penambahan anggaran tersebut maka pagu Kementerian Dalam Negeri termasuk DKPP di APBN 2024 menjadi Rp3.347.771.832.000,00 dan BNPP menjadi Rp232.574.309.000,00.

ANGGOTA RAPAT:

Ketua.

Enggak bisa ditayangin, enggak bisa ditayangin itu yang dibacakan?

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Enggak ada belum-belum, ada enggak?

Jadi itu beberapa catatan yang nanti kita akan perdalam dalam rapat ini. Karena sudah dibacakan nanti di *copy* saja dikasih ke masing-masing anggota.

Baik selanjutnya kami persilahkan kepada Saudara Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan ini.

Silahkan.

MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POLISI (PURN) PROF. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph. D.):

Terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Siang,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Nama budaya,
Salam kebajikan,

Yang kami hormati Pimpinan dan segenap Anggota Komisi II DPR RI yang kami muliakan, kemudian Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), Rekan-rekan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama baik jajaran Kemendagri maupun BNPP, Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Terima kasih atas undangan yang telah kami terima dari Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, tanggal 7 September 2023 undangan rapat kerja sebagai pengantar rapat kerja dan RDP.

Izinkan kami menyampaikan kami menyampaikan materi mengenai pagu anggaran dan rencana kerja dan anggaran/RKAKL Kemendagri 2024. Kemudian usulan tambahan anggaran Kemendagri Tahun 2024, meskipun tadi sudah disampaikan Pimpinan, Banggar memberikan tambahan.

Kemudian juga pagu anggaran rencana kerja anggaran BNPP, *ex officio* Mendagri sebagai Kepala BNPP. Sebagai mana dengan tema dan arah kebijakan rencana kerja pemerintah 2024, dengan tema Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Maka arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah 2024 adalah prioritasnya mengurangi kemiskinan dan penghampusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas kelayakan kesehatan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan tranfungsi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan ibu kota nusantara dan pelaksanaan Pemilu 2024.

Kemudian juga ditetapkan sasaran pembangunan Pemerintah 2024, pertumbuhan ekonomi diangka 5,3 sampai dengan 5,7%. Tingkat Kemiskinan diangka 6,5 sampai 7,5%. Pengangguran terbuka 5 sampai dengan 5,7%. Gini

ratio antara 0,374 dan 0,377. Indeks pembangunan manusia 73,99 sampai 74,2 dan penurunan emisi gas rumah kaca 27,7%.

Selanjutnya ada 7 prioritas nasional RKP Tahun 2024.

- Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas berkeadilan;
- Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- Meningkatkan SDM berkualitas berdaya saing;
- Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Serta
- Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi layanan publik.

Berdasarkan tema arah kebijakan sasaran prioritas nasional pemerintah tersebut, maka Kemendagri telah menetapkan arah kebijakan.

Yang pertama adalah peningkatan politik, hukum, ketertiban, pengawasan, Pemerintah Daerah. Melalui Sekjen, Dirjen Otonomi Daerah, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Dirjen Bina Adwil, Dirjen Bangda, Dirjen Bina Pemdes, Inspektorat Jendral dan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri.

Kedua, memfasilitasi pengawasan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024 melalui Sekjen kemudian juga DKPP, Dirjen Otonomi Daerah, Dirjen Adwil, Dirjen Pembangunan Daerah, Dirjen Keuangan Daerah, Irjen, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, serta Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dan IPDN.

Yang ketiga mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pengendalian inflasi, penguatan investasi, kemudian izin berusaha oleh Dirjen Polpum, kemudian Dirjen Bina Adwil, Dirjen Bina Pemdes, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Dirjen Bangda, dan Dirjen Keuangan Daerah, serta Inspektorat Jendral.

Yang keempat adalah penguatan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, termasuk penguatan keuangan daerah, kualitas pembangunan daerah dan Pemerintahan Desa.

Kemudian yang kelima adalah memfasilitasi percepatan penurunan *stunting*, pengurangan kemiskinan dan penghampusan kemiskinan ekstrim, terutama oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah dan Dirjen Bina Pemdes.

Selanjutnya mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau (SIPD). Penguatan transformasi digital dan layanan administrasi kependudukan.

Yang ketujuh adalah dukungan fasilitasi percepatan pembangunan IKN. Ini yang terutama peranlah Dirjen Bina Pembangunan Daerah dan Dirjen Bina Adwil.

Kemudian percepatan penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan infrastruktur dasar di 4 daerah otonomi baru di Papua.

Yang kesembilan adalah peningkatan kualitas aparatur Pemerintahan Dalam Negeri, reformasi birokrasi, strategi kebijakan pemerintahan dalam negeri atau (LITBANG) melalui sejumlah komponen yang ada di Kemendagri.

Yang terakhir adalah peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pemerintah dalam negeri, dan sarana prasarana Kemendagri oleh Sekjen, Dirjen Bina Adwil, Dirjen Bina Pemdes, Bangda, kemudian Dukcapil, strategi kebijakan dalam negeri, Otda, Polpum, IPDN dan BPSDM.

Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas tanggal 31 Juli 2023, hal pagu anggaran belanja Kementerian/Lembaga tahun 2024.

Pagu Anggaran Kemendagri Tahun 2024 sebesar 3,32 triliun. Kemudian total pagu anggaran Kemendagri tersebut mengalami kenaikan sebesar 111,04 miliar atau 3,46% dibanding dengan pagu indikatif 3,2 triliun. Kenaikan pagu anggaran tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas, antara lain untuk penguatan perencanaan penganggaran daerah melalui pengembangan SIPD 91,93 miliar rupiah.

Kemudian untuk memfasilitasi dan dukungan ketentraman ketertiban umum.

- Linmas Pemilu Pilkada sebesar 5 miliar pada Dirjen Bina Adwil.
- Kemudian dukungan daerah otonomi baru Papua sebesar 14,10 miliar.

Selanjutnya dari anggaran 3,32 triliun tersebut kalau dilihat dari kelompok belanjanya adalah:

- Belanja operasional sebanyak 1,55 triliun atau 46,80%.
- Dengan belanja pegawai sebanyak 927,28 miliar atau 59,7%;
- Kemudian untuk belanja barang operasional dan pemeliharaan perkantoran sebesar 626,91 miliar; dan
- Untuk belanja *non-operasional* ini sebanyak 1,76 triliun.

Sumber berdasarkan sumber pendanaanya rupiah murninya 3,22 triliun. Sedangkan PNBP sebanyak 48,35 miliar, antara lain:

- Penyelenggaraan pelatihan pengembangan kompetensi SDM,
- Sertifikasi kompetensi bidan pemerintahan dalam negeri, dan
- Penilaian kompetensi pada badan pengembangan sumber daya manusia atau BPSDM.

Kemudian juga di IPDN ada penyelenggaraan pendidikan bidang pemerintah dalam negeri, untuk profesi dan paskah sarjanan. Serta penggunaan sarana prasarana terutama di Dirjen Bina Pemdes.

Kemudian selain rupiah murni ada pinjaman luar negeri atau PLN sebesar 51,83 miliar atau 1,56%.

Kemudian sebagai tindak lanjut surat bersama pagu anggaran tersebut pernah dilakukan *trilateral meeting* yang meliputi Kemendagri, Bappenas, dan Kementerian Keuangan pada tanggal 14 sampai dengan 15 Agustus 2023. Dan disepakati total pagu anggaran sebesar Rp3.320.804.560.000,00 antara lain untuk:

- Pemilihan Politik Pemerintahan Umum sebanyak 157 miliar lebih kurang; kemudian
- Untuk pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa 396 miliar.
- Program tata kelola kependudukan 691 miliar, ini Dukcapil dan program dukungan manajemen yang tersebar diseluruh komponen sebanyak lebih kurang 2 triliun.

Rincian detail sebagaimana pada *slide* saya kira, kami mohon izin tidak membacakan karena sudah ada pada *slide*. Dan juga kami menyerahkan apa yang kami bacakan juga kepada Pimpinan.

Intinya adalah totalnya sebesar 3,300. Rp3.320.000.804.560,00 yang juga meliputi DKPP sebanyak 67 miliar 381 ribu 500.

Kemudian ada beberapa catatan khusus oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas, artinya yang menjadi atensi dan prioritas dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas yaitu sebanyak lebih kurang 2,67 triliun rupiah, antara lain untuk:

- Belanja oprasional pegawai 987 miliar, termasuk untuk Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 7,6 miliar.
- Belanja oprasional barang 626 miliar juga termasuk:
 - Operasional Dewan DKPP sebesar 9,42 miliar; dan
 - Bahan makan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebesar 77,30 miliar;
 - Bantuan keuangan kepada partai politik ini sebesar 126,37 miliar;
 - Pendanaan kegiatan dekonsentrasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sebesar 77,43 miliar;
 - Pengadaan blanko kartu tanda penduduk elektronik 22 juta keping;
 - Dukcapil sebanyak 224 miliar; kemudian
 - Oprasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau (SIAK) dan jaringan komunikasi pada Dukcapil sebesar 482,60 miliar.

Ada juga pendanaan proses pengawasan pengawalan Pemilu dan Pilkada pada berbagai komponen di Kemendagri dan DKPP yang berjumlah lebih kurang 90 miliar. Dan latihan dasar praja pada BPSDM Kemendagri 8,5 miliar.

Penguatan perencanaan daerah (SIPD) ini lebih kurang 91,93 miliar di berbagai komponen. Kemudian tadi untuk fasilitasi ketentraman ketertiban umum Linmas Pemilu Pilkada 2024 di Dirjen Adwil sebanyak 5 miliar. Dan dukungan Daerah Otonomi Baru Papua tersebar di sejumlah komponen dengan total sebanyak 14,10 miliar.

Selanjutnya berdasarkan *trilateral meeting* terdapat 7 prioritas nasional yang totalnya sebanyak 109 kegiatan dan pagunya adalah 375 miliar lebih:

- Yang tersebar di 9 (sembilan) unit kerja sebagaimana di layar lebih banyak lebih kurang 375 miliar;
- Kemudian rencana kegiatan prioritas Mendagri per-unit kerja; Mulai dari Sekjen termasuk DKPP prioritasnya dengan anggaran yang ada tersebut pengembangan sistem informasi (SIPD) menjadi aplikasi umum dengan target 1 sistem;
- Indeks reformasi birokrasi target 85,01;
- Pencapaian akuntabilitas kinerja katagori BB;
- Kemudian opini laporan keuangan Kemendagri dengan target WTP sudah 9 kali berturut-turut;
- Kemudian layanan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu target 1 layanan;
- Dan layanan pelayanan indeks kepatuhan etik penyelenggaraan Pemilu target 822 lembaga.

Kemudian untuk Inspektorat Jendral. Prioritas kegiatan antara lain:

- Penguatan kapasitas pengawasan penyelenggara urusan pemerintahan daerah, target 600 orang;
- Mengelola *monitoring center* untuk pencegahan khususnya berkaitan dengan tindak pidana korupsi target 38 pemerintah provinsi;
- Kemudian pemeriksaan akhir masa jabatan target 11 daerah;
- Ada juga untuk audit kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan target 1 laporan;
- Pengawasan penguatan pertumbuhan ekonomi pengendalian inflasi di 38 provinsi;
- Evaluasi pejabat kepala daerah, 275 daerah.

Kemudian untuk Dirjen Polpum, diantaranya adalah:

- Prioritas bantuan keuangan partai politik untuk 9 Parpol;
- Fasilitas penguatan demokrasi 38 daerah;
- Peningkatan kapasitas aparatur pusat daerah untuk kewaspadaan dini 450 orang, 450 orang ya;
- Kemudian juga ada dukungan pelaksanaan Pilkada serentak melalui Forum Komunikasi Sosial Politik... (suara tidak jelas pada menit 26.12) nasional.

- Kinerja daerah dalam perintah pengawal Ormas 38 provinsi;
- Penguatan demokrasi untuk masyarakat di 6 provinsi Pemilu dan Pilkada.

Selanjutnya untuk Bina Adwil prioritas utamanya adalah:

- Pelaksanaan tugas kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, target 22 rekomendasi kebijakan, batas daerah target 30 rekomendasi kebijakan;
- Kemudian fasilitas dan dukungan ketentraman ketertiban umum, Linmas Pemilu Pilkada target semua 38 provinsi;
- Peningkatan kapasitas pemerintah daerah penyelenggaraan kawal khusus 6 lembaga;
- Kemudian yang berkaitan dengan penguatan pelayanan dalam bidang layanan penanganan kebakaran dan penyelamatan di 38 provinsi;
- Asistensi penanganan permasalahan konflik pertanahan di 25 provinsi.

Dan untuk Dirjen Pemdes, target kegiatannya adalah:

- Desa yang telah memiliki batas wilayah dengan target 100 desa;
- Desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa 105 desa;
- Pelatihan aparat pemerintah desa pengurus lembaga kementerian desa target 930 orang;
- Juga penataan kelembagaan pemberdayaan PKK dan Posyandu, target 4.500 PKK dan 2.500 Posyandu;
- Pengembangan aplikasi profil desa dan kelurahan 1 sistem dan desa yang tertib disiplin anggaran, dalam pengelolaan keuangan desa target 150 desa.

Selanjutnya ada di Dirjen Bina Bangda, memprioritaskan pada pengembangan sistem informasi pembangunan daerah atau ISIPD satu sistem.

- Kemudian fasilitasi integrasi penerapan standar pelayanan minimal khususnya bidang air minum dan air limbah;
- Kemudian perumahan rakyat, pelayanan minimal bidang kesehatan, bidang sosial, dan Trantibumlinmas dengan target 412 daerah;
- Kemudian peningkatan kapasitas aparatur di daerah dalam penanganan stunting 514 daerah;
- Selanjutnya adalah memfasilitasi dokumen dan perencanaan daerah untuk transisi Pilkada serentak 2024 sebanyak 38 provinsi.

Untuk Dirjen Otonomi Daerah utamanya adalah:

- EPPD (Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) target 16 provinsi, memfasilitasi persiapan Pilkada 2024, 545 daerah; dan
- Kemudian kebijakan penyegaran birokrasi dan penyesuaian mekanisme kerja Pemerintah Daerah target 32 provinsi;
- Dan ada 3 target yang berhubungan dengan prioritas kementerian diantaranya adalah:
 - Masalah kelembagaan pegawai;
 - Kemudian pembentukan Perda dan Perkada bagi daerah; dan
 - Dukungan dalam rangka Pilkada erentak 38 Provinsi.

Untuk Dirjen Bina Keuangan Daerah prioritas utamanya adalah:

- Pelunasan APBD tepat waktu di semua provinsi;
- Kemudian SIPD di 542 daerah; dan
- Juga peningkatan pendapatan pajak retribusi daerah di 542 daerah.
- Optimalisasi dana transfer;
- Kemudian pendanaan Pilkada serentak serta penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), 542 daerah.

Dukcapil utamanya adalah:

- Pelayanan koneksitas *warehouse* berbasis NIK di 1.000 lembaga;
- Kemudian gerakan Indonesia sadar administrasi kependudukan di 15 daerah;
- Kemudian penerbitan akta kelahiran dengan target 450.000 akta.

Sedangkan untuk Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, diantaranya adalah:

- Pembinaan inovasi daerah lintas K/L;
- *Pilot project* inovasi daerah yang bersifat tematik untuk mendukung iklim inovasi didaerah terdepan, terluar, tertinggal, di 5 daerah; dan
- Penilaian inovasi terpadu lintas K/L berbasis indeks inovasi daerah.

Kemudian untuk BPSDM, utamanya adalah:

- Peningkatan kompetensi aparatur berkaitan dengan manajemen strategi penyelenggaraan pembangunan, target terutama ini adalah camat sebanyak 120 orang; kemudian
- Peningkatan kompetensi, pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 120 orang; serta
- Peningkatan kompetensi aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan penerapan standar pelayanan minimal ditarget 240 orang; dan
- Kemudian ada latihan dasar CPNS tamatan IPDN 1.629 orang; dan
- Pengembangan kompetensi manajemen kepemimpinan 2.300 orang.

Dan untuk IPDN:

- Seleksi penerimaan calon praja 1.410 orang; kemudian
- Kebutuhan bahan makanan 4.295 praja akreditasi institusi dan program studi IPDN target 8 akreditasi;
- Layanan pendidikan kedinasan target 4.295 praja; dan
- Pendidikan program sarjana S2, S3, 170 orang.

Selanjutnya seperti tadi yang disampaikan oleh Pimpinan, bahwa dari Banggar ada tambahan. Namun kami juga mencoba untuk mengajukan. Kalau masih ada peluang untuk pengajuan tambahan anggaran Kemendagri tahun 2024 sebanyak 770,77 miliar yang terbagi menjadi 5 bidang:

- Yang pertama adalah pemenuhan kekurangan belanja operasional. Kami mengusulkan tambahan 14,17 miliar rupiah pada Sekjen;

- Kemudian tambahan kekurangan bantuan keuangan partai politik dari semula Rp 1.000,00 menjadi Rp 3.000,00 rupiah per-suara sah sehingga perlu tambahan sebanyak 252,75 miliar ini untuk partai politik.
- Kemudian fasilitasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024, usulan tambahan sebanyak 8,10 miliar di beberapa komponen Kemendagri.
- Selanjutnya penguatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pertumbuhan ekomi dan pengendalian inflasi, lebih kurang 107 miliar pada sejumlah komponen di Kemendagri;
- Serta juga melihat kondisi sarana prasarana yang ada di lingkungan Kemendagri yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan di sejumlah komponen. Kami mengusulkan juga tambahan untuk pembangunan sarana-prasarana sebanyak 388 miliar, sebagaimana pada layar.

Inilah Pimpinan, yang berkaitan dengan Kemendagri. Intinya bahwa dari yang sudah disepakati tingkat kementerian, *trilateral meeting* dan yang sudah disampaikan kepada yang kami hormati Komisi II DPR RI. Kalau masih ada ruang untuk tambahan kami mengusulkan sebagaimana yang disampaikan ini.

Kemudian berkaitan dengan BNPP. Arah kebijakan tentu tetap mendasarkan kepada RKP (Rencana Kerja Pemerintah) yang sudah kami sampaikan terdahulu, maka ada sejumlah kegiatan atau target dari BNPP untuk ditahun 2024:

- Yang pertama adalah mewujudkan penegasan dan penetapan batasan wilayah negara, penguatan sistem pertahanan keamanan, dan penegakan hukum kesadaran politik kedaulatan negara;
- Mewujudkan peningkatan pelayanan lintas batas negara serta kerjasama lintas negara di perbatasan, sebagai media untuk menjaga keharmonisan hubungan antar negara;
- Yang ketiga, mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi pembangunan secara personal dan peningkatan kualitas SDM di perbatasan;
- Yang terakhir adalah mewujudkan pengelolaan perbatasan negara secara integratif dan tematik, serta berkelanjutan.

Sehingga pagu anggaran dan rencana kerja 2024 didasarkan pada arah kebijakan BNPP itu adalah yang pertama berdasarkan Surat Menteri Keuangan dan Bappenas surat bersama, 31 Juli 2023.

Pagu untuk BNPP adalah sebanyak 231,3 miliar yang bersumber dari rupiah murni. Ini sama dengan pagu indikatif yang sudah disampaikan diawal tahun, kemudian artinya tidak ada penambahan tidak ada pengurangan juga.

Total pagu anggaran BNPP dalam surat bersama pagu anggaran tersebut mengalami penurunan dibanding 2023 sebanyak 17,2 miliar atau -6% hampir 7%. Yang dulu 2023 adalah 248 miliar.

Kemudian sebagai tindak lanjut surat bersama terkait pagu anggaran tersebut sudah dilakukan *trilateral meeting* dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas tanggal 9 Agustus 2023. Dan disepakati untuk program dukungan manajemen sebesar 218,7 miliar atau 94,5% dan program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebanyak 12,6 miliar atau 5,45%.

Komposisi anggaran 231,3 miliar tersebut berdasarkan jenis belanjanya adalah pegawai 37,03 miliar 16%. Belanja barang sebesar 194 miliar atau 83,99%.

Kalau berdasarkan kelompok belanja, belanja operasionalnya adalah 180 miliar atau lebih kurang 77% dan belanja non-operasional lebih kurang 50 miliar atau 22%.

Ada sejumlah kegiatan yang di *irmak* untuk 4 proyek prioritas nasional dengan total pagunya sebesar 5,5 miliar. Sebagaimana pada *slide* mulai dari:

- Penyusunan, perencanaan, pelaksanaan peningkatan sarana prasarana di 49 pulau kecil terluar tidak berpenduduk;
- Pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan;
- Presentasi prasarana koordinasi *merge project* pusat kegiatan strategis nasional diperbatasan; dan
- Pelaksanaan penanggulangan stunting gerakan sehat diperbatasan.

Dan adanya penurunan anggaran pada program batas wilayah negara dan kabupaten perbatasan yang cukup signifikan, maka dibutuhkan pergeseran anggaran antar program dari program dukungan manajemen ke program pengelolaan batas wilayah negara sebesar 16,47 miliar. Pergeseran anggaran tersebut telah dibahas dalam *trilateral meeting* tanggal 7 September dan telah disepakati pergeserannya, jadi 16,47 miliar untuk program pengelolaan batas wilayah negara.

Target kinerja diantaranya adalah:

- Peningkatan nilai indeks reformasi birokrasi, untuk BNPP targetnya adalah A;
- Kemudian akuntabilitas kinerja aktif target A. efektivitas ... (suara tidak jelas di menit 39.00) target peringkat ke-4;
- Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE targetnya sangat baik;
- Kemudian pemutahiran indeks kawasan perbatasan di 18 pusat kegiatan strategis nasional, penyusunan rencana strategis pengelolaan batas wilayah negara 2025-2029;
- Penerapan sistem merit untuk masalah kepegawaian, kemudian

- Pemenuhan kompetensi terutama untuk kegiatan pendidikan dan latihan pegawai; dan
- Peningkatan kapasitas ASN, serta transformasi informasi publik.
- Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pengendalian pengelolaan batas wilayah negara; serta
- Perencanaan gerakan pembangunan terpadu perbatasan.
- Pelaksanaan profesional pengelolaan zona inti dan zona pendukung di PLBN.

Adapun target-target program untuk pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan diantaranya:

- Pemberdayaan masyarakat desa terdepan di Merauke Provinsi Papua Selatan; kemudian
- Peningkatan sarana prasarana Hankam di 49 pulau kecil terluar tidak berpenduduk;
- Mengidentifikasi patok batas wilayah darat di NTT;
- Penyelesaian batas wilayah darat antara RI-Malaysia, Indonesia dengan Timor Leste, dan juga dengan Papua Nugini; kemudian
- Menganalisis kebutuhan sarana prasarana Hankam non-alutsista di 3 pulau yang terluar, yaitu Pulau Karang Unarang, Pulau Roro-roro, dan Pulau Batu Mandi.

Ini sebagaimana datanya yang kami sampaikan di dalam *slide*. Mohon izin mungkin tidak secara detail kami bacakan. Tapi intinya adalah kegiatan-kegiatan di perbatasan yang meliputi di NTT, kemudian juga di Papua di Boven Digoel, kemudian juga di Merauke, serta kawasan perbatasan darat laut di Kalimantan Utara.

Juga ada sejumlah kegiatan lainnya yaitu:

- Untuk memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan angkutan barang di kawasan perbatasan laut, tol laut sebanyak 8 pusat kegiatan strategis nasional di 11 kabupaten/kota perbatasan;
- Penanganan stunting dan gerakan masyarakat sehat di Provinsi Maluku dan Maluku Utara;
- Penyusunan data jaringan jalan kawasan perbatasan di Provinsi Riau; kemudian juga
- Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kawasan perbatasan negara di 15 provinsi perbatasan; serta
- Pengukuran kinerja indeks pengelolaan kawasan perbatasan di 222 kecamatan Lokpri atau Lokasi Prioritas.

Inilah sejumlah target program-program yang akan dilaksanakan berdasarkan anggaran yang tadi sudah disepakati atau disetujui sebesar 231,3 miliar. Dari BNPP tidak mengajukan tambahan anggaran.

Demikian Pimpinan yang kami sampaikan. Intinya bahwa untuk Kemendagri sesuai dengan yang sudah disetujui sebanyak 3,32 triliun. Kami mengucapkan terima kasih dukungan dari Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II DPR RI yang kami muliakan.

Namun, kalau masih ada ruang untuk diberikan tambahan sebagaimana 5 poin yang hendak kami sampaikan, termasuk peningkatan bantuan untuk partai politik, kemudian juga sebanyak total 770 miliar, dan untuk BNPP sebanyak 231,3 miliar yang sudah disepakati dan disetujui. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Pimpinan dan segenap Anggota Komisi II DPR RI. Dan BNPP akan bekerja maksimal dan tidak mengajukan tambahan anggaran.

Demikian yang kami sampaikan sekali lagi terima kasih atas dukungannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan yang terbaik bagi kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Saudara Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya kepada Ketua DKPP. Mestinya sih sebentar saja karena angkanya kecil, pasti kita setuju.

Silahkan Pak.

KETUA DKPP (HEDDY LUGITO):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semua.
Selamat siang.

**Ketua dan Pimpinan Komisi II DPR RI yang saya hormati,
Menteri Dalam Negeri,
Bapak/Ibu Hadirin yang saya hormati,**

DKPP singkat saja, berdasarkan Nota Dinas Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3, tanggal 18 Agustus, anggaran DKPP ditetapkan 67 miliar, *alhamdulillah* ini berarti ada kenaikan 258% dibanding tahun anggaran 2023 yang cuma 26 miliar.

Kenaikan yang luar biasa kami haturkan terima kasih kepada Pimpinan Komisi II DPR RI dan seluruh Anggota juga Bapak Menteri Dalam Negeri.

Sehingga dengan dukungan tambahan anggaran diharapkan kinerja DKPP akan semakin meningkat.

Terima kasih pula karena sudah disetujui usulan tambahan anggaran sebesar Rp22.621.720.000,00 sehingga total anggaran DKPP untuk tahun anggaran 2024 itu sebesar Rp90.003.220.000,00.

Pimpinan yang saya hormati dan seluruh Anggota Komisi II,

Tambahan anggaran Rp222.621.720.000,00 itu DKPP akan digunakan untuk:

- Satu, penyesuaian uang kehormatan sebesar 7,43%;
- Juga untuk penambahan tenaga pengamanan, kebersihan, pendukung keamanan dan lain sebagainya sebesar 18%;
- Kemudian untuk pemeliharaan gedung dan kantor DKPP di Kalisari Pasar Rebo sebesar 47%.

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,

Jadi tahun depan DKPP mendapatkan kantor baru yang perlu direnovasi letaknya di jalan Kalisari Pasar Rebo, jauh dari pusat pemerintahan. Kantor baru itu kita harapkan akan menjadi sekretariat untuk pendukung. Sedangkan kantor persidangan untuk sementara DKPP akan masih menempati di kantor yang lama, di kantor jalan Wahid Hasyim yang itu adalah kantornya Bawaslu.

Di kantor itu sekarang ini sangat tidak memadai, karena halaman parkirnya hanya cukup untuk 8 mobil parker. Jadi kalau demo yang datang hampir setiap minggu belakangan ini enggak bisa masuk karena sudah penuh mobil jadi demonya di jalan dan ganggu, mengganggu jalan Wahid Hasyim.

Selain untuk renovasi kantor di Kalisari juga akan digunakan untuk biaya listrik. Di kantor Pasar Rebo, juga mobilisasi ke gedung dari Pasar Rebo-Kalisari, dari Wahid Hasyim ke Kalisari. 22% akan digunakan untuk pemeliharaan dan operasional berkelanjutan terhadap *call center* dan *monitoring dashboard* DKPP.

Demikian Pimpinan, selengkapnya kami sampaikan secara tertulis biar tidak memperpanjang kata ini.

Semoga penambahan anggaran yang diterima DKPP bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, dan mengawal Pemilu 2024 berlangsung dengan damai dan berintegritas.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Saudara Ketua DKPP.

**Bapak/Ibu sekalian,
Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,**

Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan baik dari Saudara Menteri Dalam Negeri juga selaku Kepala BNPP dan juga Ketua DKPP.

Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak/Ibu kalau masih ada yang merasa perlu untuk melakukan pendalaman.

Pak Gaus, Pak Cornelis, Pak Haruna, dan Pak Toha.

Silahkan Pak Gaus.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,
Pak Menteri Dalam Negeri beserta Wakil Menteri Dalam Negeri, beserta
Seluruh jajaran Kementerian Dalam Negeri,
Beserta kuesioner DKPP,
Hadirin dan Hadirat yang berbahagia,**

Menyimak dan mendengarkan, serta saya membaca bahan-bahan yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri beserta DKPP. Ada beberapa hal yang perlu saya dalami, saya pertanyakan terhadap paparan yang disampaikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri.

Pertama tentu saya memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap anggaran Kementerian Dalam Negeri, di mana pagu anggarannya dari pagu indikatif 3,2 sekian T naik menjadi 3,320 T.

Namun, dalam hal ini Pak Menteri juga menyampaikan tentang perlu adanya penambahan anggaran. Yang disampaikan itu adalah jumlahnya sebanyak 770 miliar. Poin-poinnya juga sudah dipaparkan di sini dan saya tidak perlu mengulaskannya dalam rangka menghemat waktu.

Namun, karena saya lihat apa yang beliau sampaikan ini, tentu saya yakin kawan-kawan Komisi II akan menyikapi dan menyetujui terhadap penambahan anggaran 770 itu. Tentu kita harapkan kepada Badan Anggaran yang ada di Komisi II untuk bisa memperjuangkannya.

Salah satu diantaranya adalah apa yang saya sampaikan ketika konsinyering, bahwa anggaran untuk partai politik yang Rp1.000,00 itu sudah-sudah sangat lama tidak dilakukan penambahan anggarannya.

Di satu sisi, saya sudah panjang lebar juga ketika itu memaparkan. Hampir semua NJO termasuk juga KPK mendorong untuk melakukan kenaikan anggaran bantuan kepada partai politik. Cuma kita enggak tahu kenapa Badan Anggaran bersama Menteri Keuangan tidak-tidak juga dalam menyikapi apa yang selalu setiap tahun kami ingatkan. Dan *alhamdulillah* pada hari ini apa yang saya suarakan di konsinyering pada hari ini sudah diakomodir. Tadinya yang ditulis adalah Rp1.000,00 sekarang ini ada tambahan anggaran itu dan itu selalu dilakukan.

Jadi tentu saya atas nama kawan-kawan juga memberikan apresiasi terhadap aspirasi partai politik yang kami ini adalah representasi dari partai politik itu. Dan partai politik juga banyak sorotan banyak macam-macam yang disampaikan. Disatu sisi ruang untuk berapresiasi dengan anggaran malah tidak diberikan sesuatu yang menggabarkan, jadi ada paradoksi yang saya lihat. Kita ditekan, kita disorot, kita dimacam-macamkan tetapi anggaran sangat-sangat terbatas.

Di sisi lain juga dinegara lain saya enggak usah ungkapkan bahwa ada di suatu negara yang sepenuhnya biaya operasional dari pada partai politik itu ditanggung oleh negara.

Yang kedua adalah tentang penekanan saya tadi itu adalah saya pribadi dari Fraksi Partai Amanat Nasional dan juga kawan-kawan yang lain akan mendukung tambahan anggaran yang dimintakan oleh Kementerian Dalam Negeri yang jumlahnya adalah Rp770.000.000.000,00.

Kemudian yang berikutnya adalah tentang anggaran pagu anggaran kerja Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, itu pada tahun anggaran 2024 hanya 231 sedangkan pada tahun anggaran yang 2024 tadi saya katakan hanya, sekarang malah melorot menjadi 248, turun 6 M dari yang ditentukan.

Yang lebih signifikan lagi adalah apa yang Bapak Menteri paparkan tadi turun drastis di antara kegiatan itu disamping penurunan pagu anggaran adalah tentang program pengelolaan batas wilayah, turunnya adalah 70% Pak Menteri. Kalau 70,52% tentu yang tersisa hanya dari tahun 2023 itu 29,48%.

Yang ingin saya tanyakan adalah namanya saja adalah program pengelolaan batas wilayah. Dan ini kemarin di konsinyering pun juga sudah saya ulaskan, tetapi sekarang yang top managernya adalah Pak Menteri, tentu saya ingin juga mempertanyakan. Tentu akan terganggu program-program yang berkaitan terhadap hal-hal yang sangat strategis ini.

Kenapa ini di saya lihat, Pak Menteri tidak ada keinginan untuk melakukan penambahan anggaran dari hal ini, anggaran dari rencana kerja Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Tahun 2024.

Barangkali tantangan yang dihadapi oleh Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan ini tentu lebih signifikan dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena negara-negara tentangga kita ini, terutama Malaysia kemarin saya ilustrasikan masyarakat kita membelanjanya itu ke Malaysia. Uang yang dipergunakan adalah uang bukan rupiah kata ringgit. Ini masalah harkat dan martabat.

Nah, ini kenapa ini tidak ada keinginan dari pada Menteri untuk melakukan penambahan anggaran, paling tidak sama dengan pada tahun yang sebelumnya?

Walaupun di kertas kerja Pak Menteri halaman 22 dikatakan, bahwa ada istilahnya adalah penggeseran anggaran, di mana dikatakan di sini akan terjadi upaya-upaya dalam rangka mem-*backup* pengelolaan batas wilayah itu lalu digeser kepada program yang lain, yang nilainya adalah 16.

Bagaimanapun ditarik anggaran yang pokok itu tentu juga akan terganggu. Tentu ini saya tanyakan apakah ini tidak sesuatu yang tidak penting lagi bagi kementerian? Sehingga diabaikan. Atau pasrah saja terhadap apa yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan bersama Bappenas itu.

Tentunya dari sisi kami Komisi II kami berhadap bahwa anggaran itu tetap sejalan selalu ditingkatkan termasuk terhadap pengelolaan batas wilayah ini.

Terakhir apa yang disampaikan oleh DKPP, apa yang juga diulas oleh Ketua karena anggarannya juga tidak banyak, kecil. Yang jumlahnya hanya 67 M lalu diminta untuk ada tambahan sebanyak 22 M, tentu saya berharap kawan-kawan Komisi II akan mendorong, mendukung, dan memfasilitasi, dan memperjuangkan penambahan anggaran sesuai dengan apa yang diulas oleh Ketua DKPP.

Barang kali demikian Pimpinan terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Gaus.

Selanjutnya Pak Haruna.

F-PKB (H. HARUNA, M.A., M.B.A.):

Terima kasih Pak Ketua.

Bismillahirrahmanirrahim.

Yang kami hormati Pak Menteri, Pak Ketua dan Teman-teman, Hadirin-Hadirat,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya langsung Pak, ini masih terjadi sampai hari ini Pak. Pemerintah kita anggap berhasil karena disini anggaran halaman 6. Program dukungan manajemen 2,1 triliun. Berarti termasuk pelayanan manajemen perizinan.

Yang kami tanyakan ke Pak Menteri berhasil kita ucapkan terima kasih, Pemerintah membikin sistem perizinan 1 atap. Tapi mejanya Pak 10, atapnya 1 mejanya 10. Nomor 1 cuti hamil meja 1, nomor 2 cuti melahirkan, nomor 3 Pak birokrasinya panjang pertanyaan persyaratan, perpanjangan izin Pak masih minta akta Pak. Masih minta akta perusahaan ini perpanjangan berarti birokrasi panjang. Kemudian minta bukti pajak, minta PBB, minta keterangan gedung, itu meja ke-3.

Karena ada istilahnya OSS kita *oke*, Pengusaha tidak protes Pak OSS itu, artinya sistem online pendaftaran perusahaan untuk mengetahui berapa perusahaan di-Indonesia. Apakah perusahaan termasuk perusahaan kelas A, B, C, dan perusahaan yang kena pajak dan perusahaan tidak kena pajak itu bagus Pak. Cuma yang tidak bagus Pak birokrasinya.

Kita anggap pemerintah hebat untuk mendata berapa berapa perusahaan di Indonesia dan seluruh klasifikasinya.

Yang kita minta Pak bisa enggak kita ikut aturan NPWP Pak. NPWP selama 3 tahun *online* Pak berhasil 18,2% wajib pajak tambahan baru di Indonesia Pak. Nanti kemungkinan 7 tahun kedepan kita bisa 90%-100% wajib pajak pengusaha di Indonesia berhasil. Kita ya terima kasih *thank you*-lah kepada pemerintah. Tapi perizinan Pak belum terima kasih Pak belum karena meja itu.

Jalan keluar yang ke-2, Pak bisa enggak pendaftaran sekaligus registrasi dan penyelidikan berkas, meja ke-2 Pak persetujuan, sebab 30% energi pengusaha Pak diarahkan pengurusan perizinan karena dia cari yang kurang Pak,

pengusaha pasti ada kurangnya. Yang tidak ada kurangnya itu Pak malaikat, tidak ada malaikat mau berbisnis.

Nah orang Bapak dibawah cari yang kurang, KTP yang harus dilegalisasi, harus diini mana PBB nya mana Pajak lamanya, mana laporan keuanganya Pak? Ini baru mau izin usaha Pak. Bagaimana lagi nanti masuk di bursa usaha Pak melawan kompetitif tidak gampang Pak, melawan konglomerat melawan naga sembilan, melawan ini mana naga sepuluh tidak gampang.

Ini kalau bisa diikuti Pak, artinya ada tim Bapak menyusun ikut di NPWP, supaya energi pengusaha-pengusaha baru kita tidak terkuras ke pengurusan izin, pengusaha-pengusaha menengah kebawah. Saya kira itu Pak jalan keluarnya, supaya kita bisa hidup dari mempertahankan cadangan devisa dari pengusaha kecil menengah.

Yang kedua juga kita pribadi setuju anggaran 770 miliar itu Pak mohon Pak Ketua ikut juga itu, sekian.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Haruna.

Selanjutnya Pak Cornelis.

F-PDIP (Drs. CORNELIS, M.H.):

Terima kasih Pak Ketua.

Yang terhormat Ketua, Wakil-wakil Ketua, dan Rekan-rekan Anggota DPR Komisi II yang saya hormati, Yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Jendral Departemen Dalam Negeri dan seluruh jajarannya. Yang terhormat Ketua DKPP bersama dengan Komisioner DKPP,

Pertama saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya, setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dan Sekretaris Jendral Departemen Dalam Negeri, yang dimana PJ Kalimantan Barat sudah dilantik terima kasih.

Yang ke-2 masalah anggaran, kami sudah bertempur di Banggar Pak. Jadi untuk Pak Gaus saya sudah ngomong itu masalah bantuan partai politik tidak sesuai lagi dengan inflasi dengan harga yang sekarang, kemarin kami masih bertengkar masih berdebat dengan Dirjen Anggaran. Tapi karena orang-orang Departemen Dalam Negeri ini ketika mau pengambilan keputusan mikirin eselonnya yang paling rendah ini persoalan Pak Menteri. Jadi kalau bisa itu kirim itu minimal itu dirjen kalau mau ngambil keputusan di Banggar karena saya yang bertempur di Banggar sana.

Soal anggaran Departemen Dalam Negeri ini sebenarnya kalau kita lihat pekerjaannya enggak sesuai kecil amat, terlalu kecil. Urus batas wilayah saja sudah berapa tim, tim dari pusat dari mana dari mana, ongkosnya juga besar. Jadi kalau bisa dikirim orang-orang yang kompeten Pak. Jangan ini tadi saya sampai ditanya sama Banggar, Ketua Banggar lagi yang nanya "Pak Cornelis katanya kan sering berhubungan dengan Kementerian Dalam Negeri berpuluh-puluh tahun, apa memang begini modelnya?"

2 orang dikirim yang satu 1 perempuan judes lagi, aduh aku bilang. Sampai saya telfon Pak Sekjen dan saya bilang beliau izin ada kegiatan penting, pengalaman pahit ini ya kalau kira-kira pengambilan keputusan dalam memperjuangkan anggaran ya kirimlah yang kita bisa diskusi, sehingga saya membela juga enak begitu.

Selanjutnya mengenai masalah sekolah kita ini. Kenapa jatah kita ini kurang Pak? Pak Rektor? Kita sudah pertanyakan dengan Menpan itu, masalah sekolah kedinasan saya bilang dikurangi? Itukan menciptakan kader-kader pamong praja kedepan, untuk mengelola negara ini NKRI ini. NKRI ini harus kita rawat kita jaga orang-orang yang memang kompeten. Enggak bisa jawab waktu itu kita, enggak tahu MenPAN ini kenapa dikurangi jatah kita itu. Hilang berapa itu Pak? Banyakkan.

ANGGOTA RAPAT:

Kalbar ya Kalbar?

F-PDIP (Drs. CORNELIS, M.H.):

Bukan hanya Kalbar, seluruh Indonesia. kalau bisa itu setiap kabupaten itu ya minimal itu satu-satulah sehingga kita tidak kehilangan jati diri Departemen Dalam Negeri ini. Depdagri ini kan beda dengan departemen-departemen lain. Ada juga politisnya, ada juga profesionalnya jadi kombinasi.

Selanjutnya masalah perbatasan, ada orang perbatasan ini? Nampaknya profesornya enggak ada ini. Itu jalan-jalan koridor perbatasan itu tolonglah dikasih tahu Menteri PU-nya itu diselesaikan, jangan dibiarkan. Tapi yang tanggung jawab Departemen Dalam Negeri yang di Jagonya itu sudah sangat bagus itu, luar biasa

itu Pak Menteri terima kasih Pak Menteri, mantap. Cuma yang PU ini yang aduh ditinggalkannya saja begitu saja.

Lalu mengenai Camar Bulan, perbatasan kita di Camar Bulan itu orang-orang di Camar Bulan itu sudah diusir sama Malaysia. Selanjutnya di Tanjung Datuk, Melanau itu Malaysia sudah bikin border, Indonesia belum. Kalau enggak percaya nantilah kita pergi sama-sama, saya ketika reses saya kesana.

Lalu untuk Dirjen Pemerintahan Desa, ada? Ada. Inikah yang judes dulu itu itu? Bukan, soalnya Banggar yang bilang begitu bukan saya.

Ini saya minta Peraturan Pemerintahnya atau Peraturan Menteriya mengenai tata cara pengangkatan dan pemberentihan staf desa. Karena ini banyak masalah, Kepala Desa terpilih sudah dipecat-pecatin orang seenak-enak perutnya. Kalau perlu di PDF-kan saja dengan saya.

Saya males lagi mencari-cari itu. Kalau dulu gubernurkan nyaman kita tinggal perintah aja kita minta peraturan ini peraturan ini, kalau DPR inikan staf kita seram juga.

Di PDF kan saja di nomor saya ada nomor resmi saya, ketika orang nanya saya waktu reses atau kunjungan kerja saya bisa menjawab dan menjawab tidak asal jawab, dan kita menjawab mem-*back up* Pemerintah karena kami adalah pengusungnya bukan menghajar Pemerintah.

Lalu untuk Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, ada? Ini-ini masalah teknis ini, kalau masalah anggaran *no problem* saya bertempur di Banggar. NIK ini bisa berubah, Pak. Keponakan saya itu NIK-nya dia orang Kalimantan Barat, Kabupaten Landak, Kecamatan Menjalin, Desa Menjalin. Tapi NIK-nya sama dengan orang Depok, bagaimana ini mengubahnya sulit sekali. Bagaimana tata caranya bisa diubah? Ini tolong diberi pemahaman, penjelasan.

Selanjutnya untuk Kepala-Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu. Kalau memang sudah lewat 5 tahun atau 3 tahun ganti saja jangan terus monotorium-monotoriu. Jadi ada penyegaran kalau perlu panggil Departemen Dalam Negeri kasih dia *briefing* dulu di *briefing*. Kalau istilah jaman orde baru itu ditatar diberikan penataran dulu. Karena masalah kependudukan ini sangat penting sekali Pak.

Nah yang terakhir untuk DKPP. DKPP ini harus pasang telinga mata dimana-mana sehingga Pansel-Pansel itu tidak seenak perutnya saja, bahkan sogok segala macam, ditekan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya untuk meng-*goal*-kan calon-calonnya. *Nah*, ini tolong itu Pak di cek betul-betul terutama pemilihan Kepala KPU, Bawaslu, Kabupaten/Kota. *Nah*, inikan tadi banyak masalah sehingga saya juga enggak mau ikut campurlah, pusing kepala

saya bilang enggak mau. Saya sampaikan saja dengan Pak Ketua. Ternyata Pak Ketua juga sudah mencium dimana-mana.

Saya rasa itu dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan tapi untuk anggaran Pak Menteri tak usah khawatir, itung-itungan saya Kementerian Dalam Negeri itu kecil Pak untuk mengurus tata batas saja sudah pusing kepala. Saya ini 49 tahun di Departemen Dalam Negeri ini NIP saya 01, saya lari ke dunia politik ini kecelakaan. Saya rasa begitu ya, jadi enggak usah khawatir.

Pak Gaus jangan khawatir, saya sudah hajar itu kemarin sama dengan Pak Syaid Abdulah selaku ketua. Kita minta itu kalau perlu 5 ribu saya bilang jangan seribu, seribu itu bisa beli apa? Rokok sebungkus saja enggak cukup.

Terima kasih.

Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Terima kasih Pak Cornelis.

Tadi kita sepakat sampai jam 12.30, saya minta persetujuan kita perpanjang sampai jam 1 ya.

(RAPAT: SETUJU)

Silahkan Pak Toha.

F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Terima kasih Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Ketua dan Anggota yang saya hormati,
Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, Pak Sekjen, Pak Rektor, Ketua DKPP, dan
semua jajarannya yang saya hormati,**

Yang pertama adalah pada dasarnya saya atas nama Fraksi PKB, berapapun anggaran yang diajukan oleh Kementerian/Lembaga termasuk Kementerian Dalam Negeri dan DKPP pasti kita akan dukung karena kita mitra. Dan itu untuk berjalan baik dan efektifnya para Kementerian dan Lembaga yang menjadi mitra kita.

Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Profesor Hadi, yang barusan mendapatkan gelar guru besarnya ya Ilmu Pemerintahan, luar biasa selamat Pak Hadi.

Jadi begini Pak, sebenarnya saya hanya akan mengulangi beberapa pendapat dan usulan teman-teman. Karena di beberapa Ditjen di Kementerian Dalam Negeri ini ada beberapa yang bisa kita sinergikan dengan anggota yang ada di Dapil masing-masing. Karena kebijakan, penetapan anggaran, dan bahkan penetapan program maupun sampai kegiatan, itu kita apa ikut andil didalamnya.

Oleh karena itu tidak atau tidak mustahil ketika kita bekerja sama bersinergi di daerah pemilihannya masing-masing. Seperti kemarin Undang-Undang ASN yang Pak Polisi, Pak Tentara pun bisa di struktural ASN. Oleh karena itu mungkin nanti bisa dilihat lagi atau diinventarisir lagi mana-mana yang bisa kita kerjasamakan di Dapil.

Misalnya sekarang ini baru ramai-ramainya Undang-Undang Desa, meskipun Perpres apa namanya Surpresnya baru nanti tanggal 18 ke Baleg ya Pak ya dan akan kita bahas bersama-sama. *Nah*, ini menurut saya momentum bagi dirjennya Dirjen Bina Pemerintahan Desa meskipun saya belum kenal orangnya, Pak Eko mana Pak Eko? Enggak ada ya.

Dirjen Pemerintahan Desa itukan ada misalkan pembinaan atau advokasi terhadap aparatur pemerintahan desa. Saya ingin ada juga sosialisasi advokasi kepada aparatur desa maupun perangkat desa. Ini nanti akan sinkron Pak dengan kebijakan-kebijakan kelembagaan yang lain. *Nah* itu contoh, salah satu contoh.

Kemudian juga ada peningkatan kapasitas semacam-sembacam itu. Sebenarnya kita bisa diajak Pak, tidak ambil program atau kegiatannya tapi kita ikut berpartisipasi sebenarnya semacam itulah.

Dan mungkin di dirjen-dirjen yang lain juga ada beberapa yang bisa kita sinergikan di daerah pemelihannya masing-masing. Saya pikir Pak Menteri yang kayak-kayak begini sudah paham atau sudah *ma'fum* apa yang saya maksudkan.

Kemudian hal-hal yang lain Pak, di Dirjen Otonomi Daerah ini sangat penting, Pak. Karena yang menjadi rusaknya demokrasi salah satu ketidak netralan ASN. Ini yang di situ ada prioritas program Kementerian di Dirjen Otonomi Daerah itu yakni netralitas ASN di daerah dalam rangka Pilkada Serentak dengan target 38 provinsi. Menurut saya ini penting. Karena kalau saya kita berteori negara ini akan adil makmur kalau demokrasinya baik. Demokrasinya baik kalau Pemilunya sukses. Pemilunya sukses kalau penyelenggara, peserta, maupun masyarakat itu juga baik-baik saja atau benar-benar saja.

Nah, oleh karena itu supaya masyarakat, aparat, penyelenggara, maupun peserta Pemilu itu baik-baik saja perlu ada program semacam advokasi, sosialisasi, atau komunikasi pendekatan kepada mereka agar tidak melanggar apa yang menjadi aturan itu.

Itu beberapa hal Pak. Jadi mohon nanti ada ketegasan dari Pimpinan dari kita semua, kira-kira misalnya mana saja yang bisa kita kerjasamakan di daerah pemilihan masing-masing yang tidak saya tidak bisa menyebutkan ini harus begini, ini harus begini tapi harus ada.

Termasuk mohon maaf DKPP sekali lagi kemarin saya sampaikan konsinyering itu DKPP ini kan belum diketahui banyak orang mahluk apa begitukan. *Nah*, ini tolong kalau ada peningkatan anggaran bisa disinergikan dengan program yang sudah ada jadi tidak kita minta program tambahan, tapi program yang sudah ada kita sinergikan lah Pak. Dan saya harap ada kedisiplinan dan komitmen serta apa dari DKPP bagi penyelenggara ini.

Begitu Pak, jadi netralitas PNS itu sangat-sangat berkontribusi kesuksesan dan ketidak suksesan Pemilu. Artinya ketidak suksesan demokrasi juga. Termasuk DKPP menjadi alat atau menjadi penyelenggara yang sangat dinantikan apanya Pak, *output*-nya sangat dinantikan kinerjanya untuk bisa membuat demokrasi ini lebih baik lagi.

Demikian secara umum saja tidak bisa sebutkan satu persatu tapi yang penting saya atas nama Fraksi PKB tentu sangat mendukung apapun yang diinginkan atau diminta oleh Kementerian dan Lembaga.

Terima kasih Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Toha.

Pak Mardani terakhir, Pak Bagus dan Pak Endro ya.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Pak Pimpinan hari ini enggak tengok ke kiri kelihatannya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Eenggak, dari kemarin saya Bapak kasih terus loh, saya kasih terus ini, yang ketiga ini saya kasih ini, jangan buat isu.

Silahkan Pak.

F-PKS (Dr. H. MARDANI, M.Eng.):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

*Alhamdulillah, allahuma sholi ala sayidina Muhammad,
Amma Ba'du.*

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua,

Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, Pak BNPP, Pak Sekjen, Pak Rektor IPDN, Pak Dirjen atau DKPP sekarang ini,

Saya 2 hal saja Pimpinan dan Anggota, mungkin ini pembahasan APBN terakhir kami sebelum 2024 kita berakhir di 30 September, 1 Oktober mungkin yang lain Pak Menteri.

Saya sudah 2 periode Pak Ketua di Komisi II, *conviction rate* 2 periode itu 22%. Maksud *conviction rate* kalau dari 55 yang kepilih kembali itu 22% 14 sampai 16 orang saja rata-rata enggak kepilih kembali, 2 kali itu begitu. Karena memang kita melihat ini komisi yang penuh perjuangan tetapi memang dengan segala halnya bebannya berat begitu tapi pahalanya banyak, sabar Pak Endro pahalanya banyak.

Oleh karena itu saya cuma mau titip pesen saja Pak Menteri, Pak Rektor IPDN, titip uang sekecil apapun akan dimintai pertanggung jawabannya didunia dan diakhirat. Karena itu prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, kolaborasi. Kolaborasi-kolaborasi ini enggak penting begitu loh, bukan karena Mas Anies Baswedan selalu angkat bab ini Pak Menteri ya kok Jakarta kolaborasi.

Karena ternyata ketika kita kolaborasi duit kecil jadi duit gede karena kita bisa bareng-bareng. Jangan sampai kalau visi saya selalu reformasi birokrasi itu miskin struktur kaya fungsi. Mestinya kementerian kita tidak 34 Pak Menteri begitu loh 15 sampai 17 cukup begitu loh, tapi gajinya gede minimal gaji itu.

Kemarin saya singgung Pak Sekjen. Pak Sekjen saya tanya, gedean mana gedean mana *take home pay*-nya dibanding Sekda di Surabaya?

Sekda Surabaya itu hampir 110 juta sebulan begitulah, di Mendagri Pak Menteri mudah-mudahan lebih ya doanya mudah-mudahan begitulah.

DKPP jangan dengar dulu Pak Prof, hehe. Kenapa? Karena ya jangan ayam sama telur mestinya kasih dulu. Pak Wamen 4, kita yang baru itu daerah bagus-bagus itu titip perjuangkan gajinya gede-gede dulu begitu. Nanti kalau ada yang korupsi tinggal dihukum aja jangan kita ayam kayak telur begitu.

Jadi titip Pak Ketua, Pak Menteri, semua. Titip anggaran efisien dan transparan. Kata Bang Napi ingat kejahatan itu karena ada kesempatan, kalau kesempatannya enggak ada, enggak ada orang bisa bikin jahat.

Nah, yang kedua saya khusus IPDN Pak Rektor, titip-titip pembinaan. Saya itu pendukung Pak Jokowi di 2014 ketika angkat revolusi mental itu bagus sekali. Tetapi revolusi mental itu harus betul-betul dimulai dari diri kita. Dari rektor, dari wakil rektor, harus jadi contoh teladan dari kami begitu loh. Dan karena itu titip untuk IPDN pembinaan karakter, kemarin sih saya sempat main ke LAN (Lembaga Administrasi Negara) mereka bagus itu bukan cuma *in class training* tetapi dia *combine* antara projek di lapangan. Dengan banyak projek wabil khusus untuk para Pamong Praja mereka bisa menjadi lebih dekat.

Saya punya sekolah, SMP sudah mulai bikin projek, salah satu projeknya mereka tahu di daerah kita mana yang produk barang mana yang produk jasa. Kan cuma toko ini barang, toko ini jasa, ternyata dari situ timbul perbincangan yang panjang kali lebar. Begitu, Pak Rektor titip-titip. Nanti yang muncul adalah wanginya IPDN, karena IPDN itu betul-betul menjadi *front liner* birokrat terbaik yang dimiliki Indonesia.

Pak Menteri satu lagi saya titip untuk Badan Perbatasan, BNPP ya. Kami pernah sekali Pak Menteri keperbatasan dengan Timor Leste di Belu itu. Mana ya? Motaain PLBN-nya bagus sekali, tinggal titip akan sangat baik kalau itu dikolaborasikan dengan Universitas Cendana kah. Jadinya itu nanti jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru karena PLBN-nya bagus.

Tapi kalau cuma fisik enggak ada aktivitas ekonomi sosialnya sehingga nanti pertahanan utama kita itu ya karena masyarakat di perbatasan sejahtera, cerdas, sejahtera, stabil.

Nanti malah, jangan kayak sekarang. Pertahun kalau datanya Dirjen Imigrasi ada 1.500-an Warga Negara Indonesia yang pindah jadi Warga Negara Singapura. Kita ingin yang dari sana yang kesini atau kita yang kuat. Kalau BNPP kita kuat dengan konsep yang integratif dan kolaboratif saya yakin Indonesia akan harum dari terdepan, terluar, dan tidak tertinggal tapi termaju.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Mardani.

Saya ingin informasikan, Pak siapa. Saudara Menteri minta izin jam 13 harus meninggalkan tempat ini karena ada rapat terbatas dengan Presiden.

Silahkan Pak Bagus.

F-GOLKAR (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Melihat waktu saya langsung saja.

Yang terhormat Pak Menteri dan seluruh jajaran,

Kongkrit saya mempertegas lagi usulan yang disampaikan oleh Anggota Pak Toha.

Jadi kepada Pak Menteri dan jajaran, saya mengusulkan di dalam kami mempertegas kepada masyarakat pendukung. Perlu diadakan salah satu kegiatan, titip kegiatan sosialisasi Pak Menteri. Jadi di Kementerian Dalam Negeri perlu dilaksanakan sosialisasi undang-undang. Contohnya saja Undang-Undang Provinsi Bali kemarin perlu kami turun kepada masyarakat mensosialisasikan karena tentang Undang-Undang Provinsi Bali, itu yang pertama.

Yang kedua, di jajaran DKPP juga perlu di bidang sosialisasi dan pengawasan DKPP, ini penting sekali. Karena pemahaman masyarakat kita tentang apasih DKPP itu banyak sekali belum ada yang tahu. Rencanakan mungkin dari DKPP berapa 10 titik begitu umpanyakan dimasing-masing daerah pemilihan, nanti perlu diakan.

Sesudah itu di bidang Damkar, sosialisasi pembentukan relawan Damkar. Apasih itu Damkar, begitu.

Yang terakhir dibidang pemerintahan desa ini sangat penting sekali, bagaimana bisa dilaksanakan sosialisasi Undang-Undang Desa kepada Kades dan Aparat Desa se-Indonesia.

Nah, ini perlu disisipkan saya titip usulan program sosialisasi ini Pak Menteri, karena penting kami menyampaikan juga seperti apa yang disampaikan Pak Mardani juga. Perlu juga bagi kami lebih tau kok dan menyampaikan apa sih fungsi saya, kita semua, fungsi anggaran, legislasi dan sebagainya. Dan ini akan lebih cepat membumikan program-program strategis dari Kementerian Dalam Negeri dan jajaran yang ada.

Sekian kira-kira Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Terima kasih Pak Bagus, terakhir Pak Endro.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang kami hormati Pak Menteri Dalam Negeri, dan Pak Wamen beserta para Sekjen dan Dirjen, dan Juga kepada DKPP,

Dan juga saya ucapkan selamat kepada Pak Rektor untuk menjabat memperoleh gelar tertinggi akademik professor. Kalau saya ambil dokter tapi belum selesai dokter kadal, kadaluarsa itu. Mungkin perlu belajar dengan Pak Mardani.

Sebenarnya saya singkat saja, kita sudah melakukan konsinyering sudah siang malam itu sudah banyak sekali perdebatan dan apanamanya kesepakatan-kesepakatan yang sudah dilakukan. Saya pikir ini ending dari pembahasan yang ada.

Itu saya minta, itu yang hasil konsinyering itu yang dari notulensi yang ada itu perlu dijawab, itu aja. Perlu dijawab supaya apa? Supaya kalau ini dari paparan yang ada itu sudah sangat memadai. Hanya yang kemarin yang belum dibahas itu dari IPDN Pak Rektor belum datang.

Khusus untuk IPDN, ini memang menurut saya juga masih sangat kurang karena apa namanya ini adalah wahana pendidikan yang dimana kader-kader bangsa ini dilahirkan dari IPDN, dan kader IPDN inikan adalah sokoguru dari pemerintahan yang ada. Saya harap ini selalu semangat walaupun anggarannya naik atau tidak signifikan menurut saya itu, untuk mengelola sumber daya manusia yang ada.

Yang berikutnya kaitannya dengan, saya sepakat saja kaitannya dengan anggaran hanya saya ingin pesan kita menjelang tahun politik, dimana

Kementerian Dalam Negeri Pak Tito beserta jajarannya, Pak Tito Komandannya ini cukup berat tugasnya. Para Dirjen bagaimana bekerja dengan baik, khususnya kaitannya yang pertama kaitannya dengan di daerah. Di daerah di mana Undang-Undang Cipta Kerja sudah berjalan, terus menampakan wujudnya di daerah-daerah, di mana karpet merah terhadap ekosistem investasi berjalan, ini cukup bagus untuk membangun perekonomian.

Nah, ini yang saya minta dari Dirjen Pembinaan Pembangunan Daerah yang kaitannya konsultasi-konsultasi yang kaitannya dengan Perda, RUTR Perubahan. Jangan sampai daerah ini disetir oleh para investor untuk mengubah tata ruang, tidak sesuai dengan tata ruang nasional. Dan nanti keluarnya Perda kan itu. Ini apa namanya konsultasi harus tetap dilakukan.

Demikian juga kaitannya dengan perekonomian daerah dimana pembangunan juga masih terseok-seok juga, peran Kementerian Dalam Negeri dalam membangun daerah, dalam mensupervisi serta melakukan konsultasi terhadap APBD ini cukup memegang peranan penting. Yang dulu mungkin tidak begitu aktif sekarang nampaknya perlu aktif lagi, karena dampaknya di mana peningkatan ekonomi daerah juga lambat, kemiskinan juga berkurangnya lambat. Ini mungkin perlu ada pembinaan dari penyusunan postur APBN.

Yang berikutnya untuk apa Dirjen Pemdes. Ini juga harus melakukan sinkronisasi jangan membuat bingung Kepala Desa. Di mana ada Permendagri bertentangan dengan Permendes itu kan jadi masalah di daerah. Dan juga kaitannya terlalu apa dituntut Pemerintahan Desa terlalu administratif sehingga lupa terhadap pengelolaan masyarakat desa. Ini kan pengaturan terlalu detail, fokus saja terhadap pembangunan desa demokrasi ditingkat desa dan sebagainya.

Sekarang kenapa banyak Kepala Desa terjebak dalam administrasi desa? Dan juga yang tahun-tahun Pemilu juga inikan desa menjadi penting supaya apa Kepala Desa menjadi pamong, pemomong, pemomong dari masyarakat sehingga suasananya kondusif sehingga pelayanan publik tetap jalan.

Dan yang terakhir kaitannya dengan apa namanya Dirjen Polpum (Politik dan Pemerintahan Umum) ini dari tanggal 4 Agustus yang lalu kalau enggak salah itukan, pembahasan rancangan Peraturan Presiden tentang Kerukunan Umat Beragama. Dimana dilintas kementerian yang ada hadir termasuk Kementerian Dalam Negeri diwakili mungkin dari Dirjen Polpum.

Ini yang menolak ini hanya dari Kemendagri, Pak Menteri. Kaitannya dengan tidak diterimanya penganut kepercayaan saudara-saudara kita masuk di dalam Perpres ini. Ini kan menjadi kontradiktif dengan namanya direktorat apa Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, di mana di sini dari anggaran-anggaran yang ada bicara masalah nasionalisme, wawasan kebangsaan, dan ormas-ormas yang ada. Tapi praktek politik yang ada menyakiti saudara kita.

Dimana Dukcapil Dirjen Dukcapil juga sudah memperbolehkan mereka punya kolom agama itu kepercayaan dan sebagainya. Ini mohon dievaluasi kembali ini memang akan dirapatkan kembali, kasihan teman-teman kita.

Mungkin itu terima kasih.

Untuk DKPP, saya tidak ada komentar. Hanya saja kerja siap, kerja yang keras supaya lebih berbobot.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Baik.

Terima kasih Pak Endro.

Bapak/Ibu sekalian,

Tadi sudah banyak masukan sebenarnya dari Bapak-Bapak Komisi II, karena sesungguhnya masalah anggaran ini sudah tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah pertama karena Komisi II tidak pernah menolak bahkan kalau ada permohonan penambahan kita akan setuju.

Dan yang kedua, beberapa permohonan itu juga sudah disetujui oleh Badan Anggaran jadi kita tinggal ambil kesimpulan saja.

Namun demikian karena tadi disampaikan kepada Pemerintah kami persilahkan Pak Saudara Menteri ya sekalian pamit mungkin.

Silahkan Pak.

MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POLISI (PURN) PROF. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph. D.):

Baik terima kasih, saya mohon izin dengan segala hormat jam 13.30 kami harus menghadiri rapat terbatas di Istana dipimpin Pak Presiden dan kami sebagai pemapar.

Jadi kami mungkin hanya 5 menit ingin menjawab setelah itu dilanjutkan oleh Bapak Wamendagri.

Jadi mengenai masalah anggaran kami mengucapkan terima kasih dukungan dari Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II. Dan kalau masih ada

ruang tadi untuk kemungkinan tambahan yang 770 miliar termasuk diantaranya adalah untuk dukungan partai politik, ya kami mohon maaf mungkin Pak Cornelis kami mungkin tidak begitu *engeh* pada saat pembahasannya. Sehingga yang datang adalah harusnya Dirjen Keuangan Daerah, tetapi dia sedang ada kegiatan di waktu yang bersamaan, sehingga diwakili oleh direkturnya atau Kasubditnya itu? Kasubdit ya, iya. Ini yang menjadi bagian bahan koreksi bagi kami, hal yang sangat penting krusial lain kali kita akan kirim pejabat yang kompeten.

Kemudian, tadi mengenai masalah BNPP, berkurang lebih kurang hampir 17 miliar. Ini bukan berarti kita tidak memperjuangkan. Sudah kita juga sampaikan tapi kami berempati juga kepada program-program lain yang lebih prioritas dari negara dari pemerintah.

Dan kemudian BNPP perannya lebih banyak sebagai lembaga coordinator. Badan koordinasi, sehingga mengkoordinasikan semua KL-KL yang ada dalam urusan perbatasan, baik PLBNnya maupun pengembangan perbatasannya pembangunan perbatasan.

Kami sudah mengajukan sebetulnya anggaran dan ini mungkin jadi bahan kita juga, jadi membuat untuk pengembangan daerah perbatasan totalnya sebanyak 15 triliun lebih, saya sampaikan kepada Bappenas/Kementerian Keuangan. Tapi tersebar disemua K/L ini. Dan ini yang nanti memerlukan koordinasi kita supaya anggaran ini mungkin diawal nanti perlu kita undang K/L penerima dana yang untuk pengembangan perbatasan ini maupun daerahnya, ini supaya mereka betul-betul membuatnya untuk kegiatan perbatasan bukan digunakan untuk yang *non*-perbatasan.

Itulah fungsi dari pada BNPP mengkoordinasikan anggaran 15 triliun ini lebih besar sebetulnya. Tapi yang 231 miliar ini lebih banyak memang untuk kegiatan oprasionalnya BNPP sendiri.

Kemudian untuk masalah perizinan tadi memang, ini bukan hanya dari Kemendagri banyak yang bekerja terutama Menpan RB. Mungkin suatu saat diundang rapat bersama mungkin yang terkait mengenai masalah perizinan. Mulai dari mitra Komisi II, dari Kemendagri yang urusan daerah tapi juga ini berkaitan dengan pusat sistem OSS ini yang dikelola oleh DKPM dan juga ada peran dari pada Kemenpan RB yang mengelola membuat ide tentang Mall Layanan Publik (MPP).

Ini MPP sedang kita dorong semua memang semua daerah dengan sistem yang digitalisasi. Tapi sekali lagi memang Kemendagri enggak sendiri disini, kalau bisa nanti pas saat tertentu rapat diundang juga dari Kemenpan RB, BKPM, dan ini juga kaitan dengan terutama di KLH dan Kementerian ATR diundang bersama khusus mengenai masalah perizinan.

Kami sangat mendukung sekali, tapi ya sekali lagi kewenangan Kemendagri terbatas tidak semua bisa kita tangani seperti masalah lingkungan hidup dan masalah apa tata ruang misalnya. Ini lebih banyak terkait dengan ATR BPN. Dan Bapak Presiden juga sebetulnya mendukung salah satu cita-cita beliau adalah kemudahan perizinan makanya dibuat Undang-Undang Cipta Kerja. Mohon dari Komisi II bisa mungkin membantu mengambil peran disitu untuk mensinkronkan.

Kemudian tadi yang berhubungan dengan IPDN. Ini mungkin bisa menjadi atensi kita juga. Misal IPDN ini karena ada keinginan mungkin waktu dengan Pak Menpan RB saya tidak mengerti sudah disampaikan atau tidak.

Jadi ada keinginan merubah paradikma IPDN tidak hanya diambil dari *fresh graduate* SMA, tapi diambil dari juga yang sudah sarjana kekhususan di bidang itu, misalnya komputer, daerah perikanan, misalnya perikanan daerah, sarjana di bidang kehutanan. Untuk ditetapkan di daerah-daerah yang spesifikasinya sesuai dengan kemampuannya tapi diberikan kemampuan akhir dibagian akhir hanya pendidikan singkat, mungkin 6 bulan, maksimal 1 tahun untuk memberikan bobot ilmu pemerintahan kepada mereka.

Nah, ini memang ada 2 paradigma itu, apakah diambil dari *fresh graduate* 4 tahun didik sebagai lembaga kedinasan khusus ilmu pemerintahan jadi menjadi generalis dia, atau spesialisasi diambil dari sarjana-sarjana ilmu kedinasan atau sarjanan umum tapi kemudian baru diberikan ilmu pemerintahan, dengan waktu yang lebih pendek. *Nah*, ini ada 2 skenario itu, banyak juga yang ini pro-kontra jujur saja dan mohon dukungan juga kita semua berfikir.

Tapi salah satu kelebihan dari pada IPDN ini sebetulnya adalah militansi, disiplin, dan lain-lain, yang tidak diterima di sekolah-sekolah umum, sekolah perguruan tinggi yang umum. Dan ini sebetulnya menjadi menurut kami menjadi nilai *plus* dari pada IPDN itu di daerah-daerah. Di daerah-daerah itu para kepala daerah merasa nyaman dengan lulusan-lulusan IPDN ini karena utamanya mereka militan, cepat bergerak, cepat bertindak, disiplin. Rata-rata begitu saya tidak mengatakan yang lain enggak, tapi itu yang kami dapat tanggapan.

Sehingga akhirnya kuotannya dikurangi untuk yang dari SMA. Yang dari non-SMA yang dari sekolah-sekolah lulusan sarjana itu yang diminta untuk ditambah diisi. Jadi tetap anggaran yang ada sebagian untuk kuota yang tadi IPDN sebagian dari sarjana-sarjana tadi. *Nah*, inilah yang saya kira mungkin apa mengakibatkan jumlah kuotanya menurun tapi bukan kuota yang SMA yang menurun tapi yang dari sarjananya tidak begitu. Tapi ini malah menjadi pemikiran bagi kita.

Saya mohon maaf karena sudah tinggal 15-20 menit lagi saya harus ke Istana dan itupun harus tanpa rem kayaknya gas terus ini. Jadi saya mohon izin diteruskan oleh Pak Wamendagri sudah dicatat semua oleh Pak Wamen.

Kami mohon pamit Pimpinan, Bapak/Ibu sekalian.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Silahkan Pak Wamen, kayaknya sudah sebagian besar sudah dijawab sama Pak Menteri tadi, dikit lagi sedikit lagi aja.

Silahkan Pak.

WAMENDAGRI (JOHN WEMPI):

Terima kasih Pak Ketua.

Mohon izin saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri tadi.

Memang ada beberapa hal yang telah disampaikan kepada kami. Tadi terkait dengan soal perbatasan memang di bulan agustus kemarin Pak, kami juga ada di Motaain kami ikut kegiatan di Motaain dalam peringatan hut kemerdekaan.

Memang apa yang disampaikan tadi benar Pak. Kita yang dikerjakan dari sisi infrastrukturnya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun, yang dikelola oleh BNPP yang dalam hal ini dibawah komando langsung oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Dan memang di sana sebenarnya jadi garda terdepan untuk pengelolaan perekonomian tapi ternyata banyak masalah yang dihadapi oleh kita yang ada diperbatasan Pak.

Contoh adalah disana sebenarnya jadi pusat perekonomian. Tapi ternyata tidak terjadi karena ini *link* dengan pihak-pihak lain. Ini dukungan perbankan juga perlu Pak. Sebelumnya ada bank-bank pemerintah namun transaksi di sana tidak terjadi karena bank-bank pemerintah yang ada kemudian tidak kembali lagi setelah kasus pandemi covid-19 Pak.

Nah, ini akan menjadi catatan buat kami untuk kedepan harus sinergi dengan Kementerian/Lembaga lain untuk benar-benar mengelola perbatasan karena ini jadi garda terdepan buat bangsa dan negara.

Kemudian tadi ada beberapa hal yang juga disampaikan oleh Bapak Cornelis ya, terkait dengan IPDN. Tadi saya kira Bapak Menteri sudah sampaikan. Memang yang lalu Pak Rektor menyampaikan di tahun 2022, itu IPDN sendiri merekrut kurang lebih sekitar 1.600 mahasiswa khususnya di IPDN, cuma di tahun 2023 berkurang jadi 534 Pak. 534 jauh drastis ya jadi yang sekarang ada kurang lebih 533 Pak, yang 1 dari Kabupaten Banjar Baru, kemudian mengundurkan diri sisanya jadi 533 pak.

Jadi ini yang mudah-mudahan di tahun yang akan datang sesuai dengan harapan dari Pimpinan dan Anggota DPR bisa kembali lebih dari itu, tapi dinamikanya yang sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Menteri.

Kemudian tadi dari Pak Toha ya Pak Mohammad Toha. Itu terkait dengan pemerintahan agar dibina pemerintahan agar sosialisasi peningkatan kapasitas desa yang ingin dilibatkan, mungkin ini akan menjadi catatan tugas kita bersama Pak, mudah-mudahan bisa kita jalankan.

Kemudian tadi juga disampaikan terkait dengan bagaimana kita mengawasi para aparatur sipil negara ASN dalam menjelang pelaksanaan Pemilu serentak di tahun 2024, agar ASN tegak lurus tetap netral.

Nah, ini berbagai kesempatan kita telah menyampaikan kepada ASN apalagi sekarang sudah banyaknya para Bupati, Walikota, dan juga Gubernur yang telah berakhir masa jabatan dan banyak dijalankan oleh para penjabat. Mudah-mudahan dengan penjabat ini tidak dipilih oleh rakyat. Sehingga bisa tegak lurus, bisa dengar apa yang bisa kami sampaikan dalam pelaksanaan Pemilu serentak di tahun 2024 bisa kita kawal dengan baik.

Kemudian tadi Pak Guspari juga menyampaikan beberapa catatan ya untuk dapat kita tindak lanjuti. Terima kasih Pak, yang tadi soal penambahan anggaran yang tadi khususnya untuk perbatasan. Bukan tidak mau cuma normatif saja disampaikan apalagi kebutuhan anggaran yang diperlukan cukup besar dalam pelaksanaan Pemilu serentak di tahun 2024.

Kemudian ada juga yang disampaikan tadi oleh keterlibatan kita dari di dirjen-dirjen lain, ini akan menjadi catatan kita untuk bisa kita kawal bersama yang bisa kita lakukan.

Mungkin Pak Ketua itu yang bisa kami tambahkan, terima kasih waktu saya kembalikan.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Baik terima kasih Pak Wamen.

Dari Ketua DKPP ada?

KETUA DKPP (HEDDY LUGITO):

Ini sedikit Pimpinan.

Terima kasih Pimpinan.

Ada pertanyaan dari Pak Cornelis tadi Pak. *Alhamdulillah* Pak, beberapa daerah soal Pansel, Pansel Penyelenggara Pemilu yang di beberapa daerah memang bermasalah dan sudah diadakan ada beberapa yang diadakan ke DKPP, itu sudah ditangani.

Pak Toha dan Pak Bagus, terima kasih. Usulannya untuk kita laksanakan Pak nanti. Tadi Pak Bagus mengusulkan 10 titik Pak yang sudah kita rencanakan 5 titik, kemungkinan bisa kita tambah nanti Pak bagus, terima kasih.

Kemudian kami sepakat bahwa DKPP memang kurang terkenal Pak. Saking kurang terkenalnya bahkan kerja pun enggak dicatat begitukan oleh masyarakat begitu.

Jadi mohon izin saya melaporkan jadi selama 8 bulan terakhir ini jumlah pengaduan yang masuk ke DKPP dan kita tangani itu 260 selama 6 bulan. Jadi kalau kita bagi 8 artinya setiap bulan rata-rata 32 pengaduan 1 hari 1, dan itu kita sidangkan semua. Anggota kita cuman 5 orang. Bapak bayangkan bagaimana kami bekerja begitu kira-kira, saking tidak terkenalnya ini tidak diketahui orang juga Pak, DKPP kerja kira-kira seperti itu Pak.

Mohon nanti terima kasih atas tambahan anggarannya, nanti untuk sosialisasi kode etik dan sosialisasi apa yang dikerjakan DKPP bisa kami lakukan Pak.

Saya kira begitu, terima kasih Pimpinan.

Akhir salam,

Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Saudara Ketua DKPP.

Bapak/Ibu sekalian,

Dengan tadi sudah.

F-PDIP (Drs. CORNELIS, M.H.):

Instruksi Pak, instruksi sedikit aja.

Terima kasih.

Saya tolong ya masalah penambahan anggaran kita di Banggar itu kemarin sudah *final* Pak. Jadi kemungkinan untuk penambahan anggaran ini agak ya kita ajukanlah tetap diajukan. Tapi Departemen Dalam Negeri sudah ditetapkan 3 triliun.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Sudah dibaca itu.

F-PDIP (Drs. CORNELIS, M.H.):

Iya, jadi untuk tambah lagi kemarin sebenarnya waktu penambahan Pak, tapi enggak ada masuk baru hari ini kita rapat, jadi mohon maaf enggak bisa apa-apa saya.

Maaf Pak Ketua ya, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Sudah Pak, Pak Cornelis sudah berjuang dan maksimal dan sudah ditambah Pak tadi suratnya sudah masuk. Tepuk tangan buat Pak Cornelis.

Kita langsung kesimpulan silahkan, mana.

1. Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri tahun 2024 sebesar Rp3.320.804.560.000,00 termasuk di dalamnya pagu anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebesar Rp67.381.500.000,00. Dan penambahan anggaran hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI untuk kenaikan gaji sebesar Rp26.967.272.000,00. Dengan demikian pagu alokasi anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 menjadi sebesar Rp3.347.771.832.000,00 dengan pengalokasian anggaran perprogram sebagai berikut:

- a. Program pembinaan politik dan pembinaan umum sebesar Rp157.353.150.000,00.
- b. Program tata kelola kependudukan sebesar Rp691.283.486.000,00.
- c. Program pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa sebesar Rp396.337.065.000,00.
- d. Program dukungan manajemen sebesar Rp2.102.798.091.000,00.

Setuju Pak ya? Yang penting lihat angkannya benar enggak.

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp770.779.139.000,00 dan usulan tambahan anggaran DKPP sebesar Rp22.621.720.000,00 dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI. Untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut serta menambahkannya kedalam pagu alokasi anggaran, pagu definitif Kementerian Dalam Negeri tahun 2024 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.

Walaupun sudah diketok kita tetapi saja terus dorong Pak, itu hebatnya Komisi II ini. Karena memang uangnya enggak ada disini, setuju Pak?

(RAPAT: SETUJU)

F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Ini jokes aja Pak, jokes aja.

Kata-kata redaksinya "meminta" atau "memohon" atau "memohon dengan sangat Pak". Untuk DKPP ini loh Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Ya, nanti. Sudah diketok Pak.

3. Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebesar Rp230.300.651.000,00 dan penambahan anggaran hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI untuk kenaikan gaji sebesar Rp1.273.658.000,00. Dengan demikian pagu alokasi anggaran BNPP tahun 2024 menjadi sebesar Rp232.574.309.000,00. Dengan pengalokasian anggaran perprogram sebagai berikut:
 - a. Program dukungan manajemen sebesar Rp451.270.486.000,00;
 - b. Program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebesar Rp12.204.474.000,00.

Setuju Pak ya?

(RAPAT: SETUJU)

KETUA DKPP (HEDDY LUGITO):

Izin Bapak, Pak Menteri, Wamen.

Itu salah ketik barang kali stafnya itu pagunya saja hanya 231,3 M Pak, kok program dukumannya langsung 451.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Jadi 251 ya?

KETUA DKPP (HEDDY LUGITO):

Yang (a) nya itu Bapak, program dukungan manajemen 451 miliar itu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Jadi berapa?

KETUA DKPP (HEDDY LUGITO):

Harusnya, sebentar Bapak, 218,70 Pak. 218,70 miliar.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Oke, segitu? Benar? Sudah benar?

Belakangnya masih kurang itu Pak. Coba dihitung lagi, dihitung lagi.

(DISKUSI RAPAT)

Sudah?

KETUA DKPP (HEDDY LUGITO):

Yang kedua, Bapak mohon izin berkenan.

Tadi sudah disetujui untuk penggeseran anggaran dari program dukungan manajemen ke program pengolahan batas wilayah negara dan kawasan

perbatasan. Apakah itu tidak langsung dijadikan kesimpulan Bapak? Yang sebenar 16,47 miliar Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Iya makanya ini kita, soalnya disampaikan di sini "telah disepakati pergeserannya".

KETUA DKPP (HEDDY LUGITO):

Siap.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Padahal sebetulnya kalau pergeseran, itu harus disetujui oleh Komisi II dulu. Jadi Bapak sudah geser dulu baru minta persetujuan.

KETUA DKPP (HEDDY LUGITO):

Izin Bapak, boleh saya laporkan Bapak.

Dalam RDP sebelum konsinyering yang lalu, Komisi II sudah menyetujui.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Iya sudah enggak perlu lagi kalau begitu.

KETUA DKPP (HEDDY LUGITO):

Komisi II sudah menyetujui pergeseran ini.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Sudahkan berartikan?

KETUA DKPP (HEDDY LUGITO):

Sudah Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Ya sudah.

KETUA DKPP (HEDDY LUGITO):

Makanya dilaksanakan *trilateral meeting* dengan Kemenkeu dan Bappenas.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Oke, iya kalau sudah, enggak perlu kita cantumkan lagi.

KETUA DKPP (HEDDY LUGITO):

Baik, siap.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Gimana sudah? Itu ya 219.969.835 benar? Betul? Sudah *tho*, oke.

(RAPAT: SETUJU)

Baik.

Bapak/ibu sekalian,

Dengan kita sudah membacakan dan kemudian menyepakati kesimpulan rapat kita. Maka rapat ini kita bisa akhiri.

Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Wakil Menteri Dalam Negeri, Pak Sekjen, kemudian Sestama BNPP, kemudian Ketua DKPP dan Bapak/ibu sekalian.

Dengan mengucapkan *alhamdulillah hirobbil 'alamin* maka rapat ini saya nyatakan ditutup.

Terima kasih.

Selamat siang,
Salam sejahtera untuk semua,

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PKL 13.27 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II,**



**Dahliya Bahnan, S.H., M.H.
197504202002122002**